

PERANG JAMBI- JOHOR (1667 – 1679) SEBAGAI SEJARAH SOSIAL

Arif Rahim¹

Abstract

This paper discusses the War Jambi - Johor in the perspective of social history. The writing is driven by the desire to show the history of Jambi in perspective methodology that is separated from the conventional historical approach. Through a historical approach strukturalis Jambi war-Johor occurring within the period 1667 - 1679 are examined using the concepts of the social structure, agency, social change, and the causal power. Thus it is known that the presence of waterway which structurally is an important international shipping lanes. The conflict between the two eventually progress to a series of open war. Jambi's defeat in the war in 1679 has resulted in social change in the empire. From the perspective of social history, conflict Jambi - Johor caused by the desire of both parties to seize hegemony in the waterway. The struggle for hegemony driven Jambi. These changes include the loss of Jambi position as the main pepper port on the East Coast of Sumatra, which followed the weakening of the authority of the empire. Weak sultanate authority has changed the role of the Orang Laut from the imperial forces become pirates. The existence of pirates has caused reluctance trader upstream (Minangkabau) to trade in Jambi, and therefore contributes greatly to the income of the sultan. Johor action is blocking the arrival of Jambi daughter as a wife as a young king to come to Johor Johor and disconnect from marriage, is a causal factor of open warfare that have an impact on social change

Keyword : war Jambi-Johor

PENDAHULUAN

Membahas perang Jambi – Johor sebagai suatu kajian sejarah adalah suatu yang menarik. Hal itu disebabkan karena peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa daerah-daerah di sekitar selat Malaka sejak lama telah menampakkan hubungan yang sangat dinamis baik dalam corak hubungan konflik maupun kerjasama. Terutama bagi Jambi, perang yang terjadi berkali-kali dalam rentang waktu (1667 – 1679) semakin menegaskan peran penting daerah ini dalam pentas sejarah nusantara.

Persoalannya adalah bagaimana peristiwa tersebut dapat dijelaskan secara baik sehingga dapat mendekati realitas masa lampau, dengan kata lain dapat menghasilkan kajian sejarah yang lebih objektif.

Berangkat dari sejumlah tulisan yang telah ada, penjelasan tentang perang Jambi – Johor masih perlu terus dikembangkan. Hal itu disebabkan karena uraian-uraiannya terperangkap semangat lokalitas kedaerahan sehingga cenderung mengakibatkan penyederhanaan pemmasalahan.

Tulisan Abdullah Zakaria (2010) berusaha menjelaskan peristiwa perang Jambi – Johor secara panjang lebar. Namun kalimatnya yang mengatakan bahwa kemenangan Johor atas Jambi pada tahun 1679 mengembalikan marwah kejayaan Johor setelah kalah pada tahun 1673, adalah pancaran subjektivitas karena kenyataan yang sebenarnya justru berbeda dari apa yang dikatakan. Selanjutnya penjelasan Lindayanti (2014), pada bahagian tulisannya yang mengulas tentang konflik Jambi dan Johor yang menjelaskan bahwa dalam berbagai pertempuran angkatan perang Jambi selalu mendapat kemenangan, serta kekalahan Jambi atas Johor disebabkan karena Johor meminta bantuan pada orang-orang Bugis adalah tidak terlalu tepat, karena pada perang yang terjadi berkali-kali dalam rentang waktu lebih dari satu dekade itu, kemenangan dan kekalahan yang dialami oleh kedua pihak terjadi silih berganti. Selanjutnya kendati kemenangan Johor atas Jambi dipengaruhi oleh bantuan orang-orang Bugis, namun faktanya keterlibatan orang-orang Bugis dalam konflik tersebut awalnya adalah atas permintaan pihak Jambi.

¹ Dosen FKIP Universitas Batanghari

Kendati unsur subjektifitas dalam penulisan sejarah adalah sesuatu yang sukar untuk dilepaskan namun seorang penulis sejarah harus tetap berupaya menghasilkan tulisan sejarah seobjektif mungkin. Caranya adalah dengan tetap berpegang pada ketersediaan data, kemudian meramunya menjadi tulisan dalam sebuah bingkai metodologi sejarah, sehingga dapat mempersempit ruang subjektifitas.

Sehubungan dengan uraian di atas, pertanyaan mendasar yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Pertama, mempertanyakan faktor-faktor apakah yang menyebabkan perang Jambi – Johor (1667 – 1679) ? Kedua, apakah akibat peperangan tersebut bagi kedua kerajaan ? Jawaban atas kedua pertanyaan di atas akan dijelaskan berdasarkan perspektif sejarah sosial terutama dengan menggunakan metodologi strukturalis.

Pembahasan tentang topik akan dibatasi secara spasial maupun temporal. Secara spasial pembahasan mencakup aspek-aspek yang mendorong peperangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan secara temporal pembahasan topik ini lebih difokuskan pada rentang waktu sekitar abad 17. Batasan waktu ini dipilih dengan alasan rentang waktu abad 17 adalah kurun dimana konflik antara kedua kerajaan mulai muncul dan sekaligus berakhir.

KERANGKA TEORITIS

Terminologi sejarah sosial yang digunakan mengacu kepada pendapat Marc Bloch yang mendefinisikan sejarah sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam dimensi waktu. Waktu di sini bukan sekedar ukuran seperti jam atau kalender, melainkan kenyataan yang kongkrit dan hidup...yakni semacam plasma yang membasahi berbagai gejala, lingkungan yang memberi makna pada gejala-gejala itu. Waktu sejarah yang kongkrit itu pada dasarnya adalah kontinuitas, tapi sekaligus diskontinuitas. Semua permasalahan dalam penelitian sejarah bertolak dari kedua ciri waktu yang bertentangan itu (Leirissa, 1999 : 70).

Peristiwa perang Jambi – Johor jika dimasukkan kedalam periodisasi sejarah yang lebih luas, termasuk ke dalam zaman VOC. Dari dimensi metodologi pembahasan tentang VOC di kelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu yang mengikuti teori Van Leur, yang mengikuti teori Braudel, dan akhirnya yang mengikuti teori Charles Tilly. Sejarah Sosial yang mengikut Van Leur dikenal dengan Sejarah Otonom, yang mengikut Braudel adalah Sejarah Struktural, sedangkan yang mengikut Tilly disebut Sejarah Strukturalis (Leirissa, 1999 : 71)

Eksplanasi penelitian ini berdasarkan pendekatan Sejarah Strukturalis. Dalam konteks ini perang Jambi – Johor akan dilihat sebagai sebuah peristiwa yang mengakibatkan perubahan sosial. Untuk menjelaskan itu akan digunakan konsep-konsep metodologi strukturalis seperti *constraining*, *agent of change*, dan *enabling*. *Constraining* adalah struktur sosial yang mengekang dan mentukan. *Agent of Change* adalah individu atau kelompok sosial yang menginginkan perubahan. Sedangkan *enabling* adalah kekuatan yang dimiliki *agent of change* untuk mengubah struktur sosial. Interaksi antara agent (peristiwa) yang *enabling* dengan struktur sosial yang *constraining* adalah inti dari pendekatan strukturalis (Lloyd : 1993).

PERANG JAMBI – JOHOR DALAM BINGKAI METODOLOGI STRUKTURALIS

1. Struktur Sosial yang *Constraining*

Struktur inti kerajaan Jambi terdiri Sultan dan lingkungan istana. Golongan ini adalah para bangsawan Jambi. Golongan ini terdiri dari lima suku yakni suku keraton, suku perban, suku raja empat puluh suku kedipan dan suku kemas. Selaku bangsawan mereka punya gelar kebangsawanan, yaitu Raden untuk yang laki-laki, dan Ratumas untuk yang perempuan. Diantara kelompok bangsawan ini suku keraton adalah yang tertinggi, karena dari golongan merekalah raja dipilih. Di lingkungan istana Sultan merupakan adalah

yang tertinggi. Selain itu jabatan yang sangat penting adalah putra mahkota yang di sebut dengan Pangeran Ratu.

Diluar Raja dan Lingkungan Istana terdapat kelompok yang disebut Orang Kerajaan, atau juga lazim disebut dengan bangsa XII. Golongan ini adalah turunan kerabat raja yang mula-mula, ketika kesultanan baru berdiri. Kelompok ini beserta kerabatnya memimpin dua belas daerah yang umumnya terletak disekitar aliran sungai Batanghari. Daerah-daerah itu yang disebut dengan **tanah nan berajo**. Disamping memerintah daerahnya masing-masing mereka mempunyai tugas pokok pemerintahan serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kerajaan. Selanjutnya adalah kelompok jenang yang mendiami wilayah diluar aliran sungai Batanghari, yang disebut dengan istilah **tanah nan bejenang**. Penduduk wilayah ini terdiri dari orang Rawas yang dikenal juga dengan suku pindah, orang Batin, dan orang Penghulu yang berasal dari Minangkabau. Selain itu wilayah ini juga dihuni oleh suku anak dalam, yang menempati wilayah merangin serta bagian timur batang Tembesi.

Diantara kelompok yang mendiami **tanah nan bejenang**, Orang Penghulu dapat dikatakan punya kedudukan yang sangat penting karena peran mereka dalam bidang ekonomi. Kebanyakan mereka adalah para penambang dan pedagang emas yang merupakan hasil utama kerajaan. Selain itu mereka adalah para petani yang berpenagalaman. Dari usaha mereka umumnya padi dan lada dihasilkan. Orang Penghulu ini berkewajiban terhadap raja membayar *jajah* yaitu sejenis pajak penghasilan (Nasruddin, 1989 : 108). Dengan demikian mereka merupakan aset sekaligus sumber penghasilan raja. Sumber penting penghasilan lainnya berasal dari pungutan pajak atas kapal-kapal yang datang dan

pergi melalui pelabuhan Jambi, serta hak monopoli penjualan atas sejumlah pruduk perdagangan seperti candu, garam dan hasil hutan (Lindayanti, 2013 : 54).

Secara geografis Jambi terletak diperairan Selat Malaka. Perairan ini adalah jalur penting perdagangan internasional, yang merupakan perpanjangan jalur perdagangan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Menurut Leirissa (1996), wilayah yang dibasahi oleh Samudera Hindia (termasuk kawasan Laut Merah, Teluk Persia, dan laut-laut Nusantara) merupakan suatu sistem komunikasi yang terpadu, serta merupakan kesatuan interaksi, yang sedikit banyaknya mempengaruhi sejarah wilayah-wilayah itu (Leirissa, 1996 : 21) Pernyataan ini sejalan dengan pendapat O.W Wolters yang mengatakan bahwa munculnya kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara adalah akibat dari reaksi penduduk setempat yang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pedagang asing sewaktu perdagangan disini menjadi semakin ramai (Lopian : 1997). Konsep pedagang asing dalam metodologi strukturis disebut *country traders* (Leirissa : 1999). Menurut Chaudhuri (1989), sejak abad 10 terjadi perubahan besar dalam sistem pelayaran niaga. Hingga abad 10 pelayaran dilakukan dengan menempuh satu jalur yang tidak terputus. Para pelaut Timur Tengah yang berlayar ke Nusantara atau ke Cina harus menempuh jarak itu sekaligus. Kalau terpaksa mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan tertentu untuk menunggu angin. Memasuki abad 10 dan 11 muncul berbagai emporium, kota pelabuhan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tidak saja memudahkan para pelaun untuk memperbaiki kapaal-kapalnya, tetapi juga memudahkan para pedagang untuk berdagang. Berbagai fasilitas ekonomi seperti kredit gudang-

gudang dan penginapan, mulai tersedia di berbagai kota pelabuhan. Keberadaan emporium berkembang secara dinamis. Seringkali terjadi persaingan dan konflik sesama emporium dalam rangka meraih dominasi pada suatu kawasan.

Selain di dekat pantai, daerah Jambi juga dilewati aliran sungai besar Batanghari, yang menghubungkannya dengan daerah Minangkabau dibagian hulu, yang merupakan daerah dataran tinggi subur dan padat penduduk, serta penghasil emas, lada dan lain-lain. Dalam hal ini besar kecilnya volume perdagangan di Jambi sangat dipengaruhi banyak atau sedikitnya kedatangan pedagang dari Minangkabau.

2. Agency yang enabling

Rivalitas Jambi – Johor dalam memperebutkan hegemoni di Selat Malaka ditandai dengan politik aliansi yang jalankan oleh pihak Jambi maupun Johor dengan pihak-pihak lain yang dinilai akan menguntungkan bagi mereka, selain itu sekaligus untuk menakuti pihak lawan. Dalam hal ini Jambi beraliansi dengan Palembang dan Mataram. Jambi dan Palembang adalah daerah vazal dari Mataram. Di pihak lain Johor berusaha mendekati VOC, guna mengantisipasi adanya serangan gabungan dari Jambi Palembang dan Mataram. Wujud konflik juga terlihat dari perebutan daerah Tungkal, yang berhasil dimenangkan oleh pihak Johor.

Di tengah konflik yang makin meruncing beberapa kali ditempuh upaya damai dengan cara menjadikan VOC sebagai mediator (Kartodirdjo, 1999 : 111 – 112). Cara lain yang ditempuh adalah dengan cara aliansi perkawinan, antara Raja Muda Johor putera Sultan Hammat Syah (1613 – 1623) dengan puteri Jambi, puteri Pangeran Ratu, yakni pangeran Dipati Anom. Akan tetapi adanya perlakuan yang tidak baik oleh pihak Johor terhadap puteri Jambi, yakni berupa tindakan mengawinkan Raja

Muda Johor dengan Putri Laksamana Tun Abdul Jamil, serta perlakuan yang melarang kedatangan puteri Jambi ke Johor yang diikuti oleh pemutusan hubungan perkawinan (Hall, 1988 : 316, Junaidi T Noor : 2010), dinilai oleh pihak Jambi sebagai aib besar dan pengkhianatan yang tidak bisa lagi ditolerir. Karena itu Pangeran Ratu bersumpah untuk menuntut balas atas perlakuan Johor terutama Sultan Abdul Jalil Syah III dan Laksamana Tun Abdul Jamil.

Dalam konteks strukturisme, Pangeran Ratu beserta segenap pendukungnya adalah *agency yang enabling* karena dia mempunyai kemampuan (power) untuk mereproduksi maupun mentransformasi struktur sosial, sekaligus juga kemampuan untuk bertindak atas nama yang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Lloyed 1993 : 93-95).

3. Perubahan Sosial

Perang Jambi – Johor yang terjadi tahun 1673, berhasil dimenangkan oleh Jambi. Dalam perang itu Jambi berhasil membawa 3500 tawanan serta harta rampasan yang banyak. Namun dalam perang yang terjadi enam tahun kemudian, pihak Jambi menderita kekalahan sehingga terpaksa membayar 3000 *rijkdalders* uang tunai, menyerahkan 3 kati emas dan dua pucuk meriam logam (Zakaria : 2010).

Akibat kekalahannya dengan Johor Jambi kehilangan posisinya sebagai pelabuhan lada utama di pesisir timur Sumatera (Scholten, 2008 : 44-45). Terjadinya perpecahan internal semakin memperlemah kerajaan. Pada tahun 1688 kesultanan Jambi terpecah menjadi kesultanan hulu dan hilir. Kendati disatukan kembali pada tahun 1720 namun kejayaan yang dulu tidak pernah kembali. Seiring dengan melemahnya otoritas kesultanan suku orang laut yang semula dapat dikendalikan dan dimanfaatkan sebagai pasukan Sultan untuk menjaga supremasi perdagangan di selat Malaka,

sekarang beralih sebagai bajak laut (Lindayanty, 2013 : 75), yang sering mengganggu kegiatan perdagangan. Kondisi ini menyebabkan enggan para pedagang Minangkabau untuk membawa dagangannya ke Jambi, sebaliknya membawa ke tempat lain yang mereka keuntung tertinggi (Scholten, 2008 : 44). Selain itu kelebihan produksi lada pada kurun waktu yang sama telah menyebabkan para petani lada beralih menanam padi dan kapas, serta menjadi penambang emas dimana Sultan karena otoritasnya yang lemah hanya mendapat sedikit keuntungan. (Lindayanti, 2013 : 76).

4. Causal Power

Causal Power dalam metodologi strukturalis bisa dicari dengan menggunakan berbagai teori. Salah satunya adalah berdasarkan teori *Collective Action* dari Charles Tilly. Menurut Leirissa (1999 : 81), teori *Collective Action* dapat dipakai apabila unsur struktur sosial yang *constraining*, serta *agency* yang *enabling* terpenuhi. Berdasarkan pola tersebut maka tindakan Johor yang menikahkan raja muda dengan putri Laksamana Tun Abdul Jamil, serta tindakan Johor yang melarang kedatangan Putri Jambi yang berstatus istri Raja Muda, dan diikuti pula dengan tindakan pemutusan hubungan perkawinan, adalah tindakan melawan adat yang mendatangkan aib serta penghinaan terhadap Jambi. Tindakan itu dinilai pihak Jambi sebagai tindakan yang melampaui batas kepatutan sehingga menyebabkan konflik berubah menjadi perang terbuka dalam skala konflik tertinggi tertinggi dari segi hubungan kedua kerajaan.

PENUTUP

Konflik Jambi – Johor adalah persaingan dua kerajaan tersebut dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Selat Malaka. Secara struktural Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang sangat penting karena merupakan penghubung pelayaran niaga internasional yang membentang mulai

dari Laut Merah dan Teluk Persia, Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan, serta laut-laut Nusantara lainnya.. Konflik antara keduanya akhirnya berlanjut menjadi serangkaian perang terbuka, yang terjadi dalam rentang waktu 1667 hingga 1679. Peperangan terjadi secara berulang dengan kemenangan yang silih berganti oleh masing-masing pihak.

Namun kekalahan Jambi dalam perang tahun 1679 telah mengakibatkan perubahan sosial pada kesultanan Jambi. Kekalahan dalam perang telah menyebabkan Jambi kehilangan posisinya sebagai pelabuhan lada utama di Pantai Timur Sumatra. Kekalahan dalam perang juga menyebabkan melemahnya otoritas kesultanan dalam berbagai hal. Beberapa diantaranya adalah ketidakmampuan kesultana untuk mengakomodir suku Orang Laut sehingga peran mereka berubah dari semula sebagai pasukan kesultanan menjadi bajak laut yang mengganggu aktifitas perdagangan. Lemahnya otoritas terlihat dari ketidak mampuan sultan dalam mengendalikan aktivitas ekonomi di daerah hulu. Banyak diantara petani lada yang mengalihkan aktifitasnya pada penambangan emas, sementara sultan hanya mendapat sedikit sekali keuntungan karena penambang dan pedagang emas tidak menjualnya ke Jambi, melainkan ketempat lain yang dinilai mereka lebih menguntungkan. Keengganan mereka untuk datang ke Jambi sebagian disebabkan keberadaan bajak laut yang akan merugikan mereka.

Dalah hal *causal factor* adanya tindakan Johor yang menghalangi kedatangan putri Jambi sebagai selaku istri raja muda Johor untuk datang ke Johor serta memutuskan hubungan perkawinan, merupakan *causal factor* dari perang terbuka yang berdampak pada perubahan – perubahan di atas .

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Lopian. *Sejarah Indonesia Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing*. Depok. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya – LPUI. 1997.

- Abdullah Zakaria bin Gazali. “ Hubungan Jambi – Johor Abad ke 17. *Makalah*. Yayasan Warisan Johor Malaysia. 2010
- Asviwarman Adam. *Merintis Sejarah Total Asia Tenggara*. Dalam Anthony Reid. *Dari Ekspansi Hingga Krisis Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Bambang Budi Utomo. *Batanghari Riwayatmu Dulu*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi 7 – 8 Desember 1992.
- Casparis, J. G. DE. *Kerajaan Malayu dan Adityawarman*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi 7 – 8 Desember 1992.
- Chaudhuri. K.N. *Trade and Civilization In the Indian Ocean. An Economic History from the Rise of Islam to 1750*. Cambridge. Cambridge University Press. 1985.
- Coedes, George. *Asia Tenggara Masa Hindu – Budha*. Jakarta Kepustakaan Populer Gramedia. 2010
- Hall. D.G.E. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya. Penerbit Usaha Nasional 1988.
- Junaidi T. Noor. “ Refleksi Kesejarahan Jambi – Johor “ *Makalah*. Pemda Prov.Jambi & Unbari Jambi. 2010.
- Lindayanty.Dkk. *Jambi Dalam Sejarah 1500 – 1942*. Jambi Disbudpar Prov.Jambi.2013
- Lloyd, Christopher. *The Structures of History*. Cambridge Massachusetta Blakcwell Publishers. 1993
- M.D. Mansur. *Sejarah Minangkabau*. dkk. Jakarta. Bharata. 1970.
- Mukti Nasrudin. *Jambi Dalam Sejarah Nusantara*. Naskah tidak diterbitkan.
- Ngebi Sutodilago Periai Rajo Sari. *Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi*. Jakarta. Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. 1982.
- Reid, Anthoni. *Dari Ekspansi Hingga Krisis Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern* Jogjakarta. Gajahmada University Press. 1993
- R.Z Leirissa. *Metodologi Strukturis Dalam Ilmu Sejarah*. Depok. PPs. UI. 1999
- R.Z Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Depdikbud. 1996
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500 – 1900*. Jakarta. Gramedia.1999
- Scholten, Elsbeth Locher. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*. Jakarta. Banana-KITLV. 2013
- Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Wacana Vol.1 No.1